

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Editorial Team

Editor in Chief

Susilo Surahman, IAIN Surakarta

Editorial Board

Latif Kusaeri, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ferdi Arifin, IAIN Surakarta

Section Editor

Muhammad Husin Al Fatah, IAIN Surakarta

Muntaha, IAIN Surakarta

Dwi Puji Hastuti, IAIN Surakarta

Khasan Ubaidillah, IAIN Surakarta

Reviewer

Hendy Yuniarto, Beijing Waiguoyu Daxue, China
Sangidu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
K Koeswinarno, Balai Litbang Agama, Semarang, Indonesia
Ismail Yahya, IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Cholichul Hadi, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia
Ahmad Fawaid Sjadzili, STAIN Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia
Tedi Kholiluddin, UKSW Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
Ibnu Hadjar, UIN Walisongo, Semarang, Indonesia
Abdul Mun'im Saleh, STAIN Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Alamat Redaksi:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah

Tel / Fax : (0271) 781516 / (0271) 782774

Website: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih>

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Daftar Isi

Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Sebuah Perspektif <i>Political Spectrum</i> <i>Saefudin Zuhri</i>	109
Islam dalam Politik Indonesia <i>Haris Zaky Mubarak</i>	123
Bulan Sabit di Negeri Komunis Tirai Bambu: Sebuah Perjuangan Identitas Umat Minoritas <i>Aly Masyhar</i>	139
Mendulang Suara Generasi Milenial Muslim: Citra Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy di Media Sosial <i>Abraham Zakky Zulhazmi</i>	163
Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui <i>Linkage Program</i> Lembaga Keuangan Syariah <i>Safaah Restuning Hayati</i>	175
Tinjauan Filosofis Pembuatan Rumah Berdasarkan Adat Islam Jawa <i>Ainun Yudhistira</i>	189
Anak Homeschooling: Studi pada Keluarga Pelaku <i>Homeschooling</i> <i>Alfin Miftahul Khairi & Dwi Sri Rahayu</i>	203



Islam dalam Politik Indonesia

Haris Zaky Mubarak, MA

Komunitas Studi Kalimantan

Abstract

One of the important political dynamics of the Soeharto administration was the question of the activeness of scholars in Indonesia's practical political activities. This study shows that the emergence of ulama who actively participated in politics and in the Islamic party at that time namely the United Development Party (PPP) was not only interpreted as a face of political expression of Muslims but also as a large colonization of the current regime against the political aspirations of Indonesian Muslims. PPP was raised by the New Order regime as part of the politics of colonization as well as maximizing the existence of Golkar as a silencer for Islamic political groups. The existence of Golkar during the New Order did not only act as a force for the interests of the New Order but also became a reliable communicator in the practice of national politics. Islamic political discourse on various issues of development and unity has always been reduced by the government for the sake of the solid political legitimacy of the New Order government.

Abstrak

Salah satu dinamika penting politik masa pemerintahan Soeharto adalah soal keaktifan ulama dalam aktivitas politik praktis Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa kemunculan ulama ikut aktif berpolitik dan dalam partai Islam saat itu yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak hanya dimaknai sebagai wajah ekspresi politik umat Islam tapi juga sebagai kolonisasi besar rezim penguasa saat itu terhadap aspirasi politik umat Islam Indonesia. PPP dimunculkan rezim Orde Baru sebagai bagian politik kolonisasi selain juga memaksimalkan eksistensi Golkar sebagai peredam kelompok politik Islam. Keberadaan Golkar pada masa Orde Baru tak hanya berperan sebagai kekuatan kepentingan Orde Baru tapi juga menjadi komunikator handal dalam praktik politik nasional. Wacana politik Islam dalam berbagai isu pembangunan dan persatuan selalu direduksi oleh pemerintah demi kokohnya legitimasi politik pemerintahan Orde Baru.

Keywords: Islam; Development; Politics; Unity

DOI: 10.22515/shahih.v3i2.1360

Coessponding author

Email: haris.zaky@gmail.com

Pendahuluan

Diskursus antara Islam dalam realitas politik praktis Indonesia merupakan hal yang kompleks. Ketika rezim Soeharto berakhir, kemunculan periode reformasi tak hanya ditandai dengan semangat demokrasi dan fase baru kehidupan bernegara tapi juga diikuti dengan riuh semaraknya kemunculan partai-partai Islam baru. Tercatat ada sekitar 141 partai Islam yang mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman dengan kekuatan basis massanya sendiri. Dari 141 tersebut hanya ada 48 partai yang lolos dalam seleksi dan berhak menjadi kontestan pemilu. Dari 48 partai tersebut ada beberapa partai - partai Islam baru diantaranya PKU (Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdatul Umat), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional), PBR (Partai Bintang Reformasi), PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PUI (Partai Umat Islam), PMB (Partai Masyumi Baru), dan lain-lain.

Maraknya kehadiran partai-partai Islam yang muncul pada masa awal reformasi ini seolah menjadi semangat baru di balik kenangan politik Orde Baru yang menyederhanakan partai-partai politik di Indonesia menjadi tiga partai, Golkar, PDI, dan PPP. Kebijakan penyederhanaan politik yang diawali ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 atau yang lebih dikenal sebagai Permen 12/1969 mengenai susunan fraksi semua DPR dan DPRD. Tujuan dari dikeluarkannya Permen 12/1969 itu untuk memaksakan masuknya anggota anggota baru di DPR dan juga DPRD dari kalangan pegawai negeri dan juga purnawirawan ABRI, yang kemudian mengubah keseimbangan komposisi kekuatan semua DPR dan DPRD. Meskipun menjadi kontroversi tapi hingga pelaksanaan pemilu tahun 1971 Permen ini tetap jalan tanpa ada upaya sedikitpun untuk melakukan peninjauan kembali.

Kemunculan permen 12/1969 ini diawali dari persoalan tahun 1966 dimana Angkatan Darat menawarkan penyederhanaan kelompok politik dengan membagi lima kelompok, *pertama*, kelompok Islam. *Kedua*, Golongan Kristen Katolik. *Ketiga* golongan nasionalis. *Keempat*, golongan sosialis pancasila dan kelima, golongan Karya yang tidak berafiliasi. Pada Mei 1967, barulah Soeharto secara terbuka mengusulkan fusi partai dua bulan setelah ia terpilih sebagai Presiden *ad interim*.

Pemilu 1971 semakin mempertajam disharmoni dari hubungan partai Islam dengan Pemerintah. Partai Islam seakan mendambakan pelaksanaan pemilihan Umum seperti yang pernah dirasakan ditahun 1955. Bahkan dikalangan NU, Rois Aam KH.Wahab Chasbullah pada muktamar NU Ke - 25 memberikan isyarat bahwa tidak ada gunanya NU menjadi partai politik karena dengan menyelenggarakan pemilu seperti tahun 1971.

Setelah pemilu 1971, kekhawatiran intervensi penguasa dalam ranah politik terbukti. Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru mempraktikkan sebuah kehidupan politik yang

sangat represif. Kebijakan politik kontroversi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru memaksa beberapa partai untuk dapat bergabung satu sama lain ke dalam satu partai dan ini membuat suara politik umat Islam menjadi terpasung dalam satu kelompok. Seluruh partai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta kelompok partai nasionalis dan Kristen yang digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kemunculan PPP sebagai satu-satunya representasi dari partai Islam di Indonesia menanggung beban yang tak sederhana. Secara historis PPP yang lahir dari fusi beberapa partai Islam seperti pendukung partai Masyumi yang telah dibubarkan pada tahun 1960 dan terpecah ke dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan juga Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Munculnya fusi atas partai Islam ke dalam satu partai yakni PPP memunculkan kerumitan sendiri secara internal. Meski bernapaskan Islam tapi masing-masing partai yang dileburkan ini memiliki latar belakang sejarahnya sendiri. Penyederhanaan ke dalam satu partai membuat setiap kelompok Islam yang memiliki visi dan misi berbeda di PPP merasa sangat dibatasi.

Selain kebijakan fusi partai politik, kebijakan politik Orde Baru yang mengundang respon besar kalangan politisi Islam saat itu adalah ketika Soeharto mulai memberlakukan Asas Tunggal Pancasila seperti yang terdapat pada ketetapan MPR RI Nomor 11/1983 dan dituangkan dalam perundang-undangan Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985. Sebagai asas untuk organisasi masyarakat maupun partai politik. Beberapa ormas dan parpol ketika itu masih menimbang keputusan tersebut. Tapi ada pula yang tegas bersikap, NU misalnya menyatakan kesediaannya menerima Asas Tunggal Pancasila dengan disahkannya hasil Muktamar NU di Situbondo pada tahun 1984.

Masuk awal tahun 1990-an perkembangan politik partai Islam menjelang pemilu tahun 1992 faktanya masih berkembang dalam bayang koloni represif pemerintah Orde Baru. Golkar ternyata masih mendominasi suara di pemilu dan parlemen masih dikuasai Golkar. Pada pemilu tahun 1992, PPP mendapatkan suara sebanyak 16.624.647, Golkar mendapatkan suara sebanyak 66.599.331. Dalam pemilu tahun 1997, PPP mendapatkan jumlah perolehan suara sebanyak 25.340.028 suara sedangkan Golkar mendapatkan jumlah perolehan sebanyak 84.187.907 suara (Mashad, 2008, p.152).

Meski posisi politik dari partai Islam ini tak pernah mampu mengalahkan Golkar dalam setiap pemilu yang berlangsung sejak tahun 1971 sampai pada masa pemilu terakhir Orde Baru 1997, sikap para Ulama pada masa Orde Baru yang seakan rela mengalah demi kemenangan besar Partai Golkar selama Orde Baru memang menyiratkan asumsi yang menarik, karena jika partai Islam mendapatkan pengakuan tersendiri sebagai sebuah partai dimana semua ulama dan umat Islam bersatu dan disatukan dalam satu wadah partai politik bernama PPP maka mengapa realitas tersebut tak sejalan dengan jumlah perolehan suara

dalam pemilu di Indonesia. Dari realitas ini ada dua hal menarik untuk dijawab yakni mengapa sikap ulama dalam berpolitik praktis tak sejalan dengan kemenangan partai Islam dalam pemilu di Indonesia? Kedua, apa yang terjadi dalam realitas Islam pada masa politik Orde Baru?

Wacana Islam Dari Kolonial ke Demokrasi Terpimpin Soekarno

Politik yang dijalankan Orde Baru terhadap Islam jelas sekali membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dinamika Islam pada saat itu. Dalam sejarah panjang baik sebelum ataupun sesudah kemerdekaan Indonesia, wacana Islam dalam politik praktis menjadi hal yang selalu berpengaruh dalam kontestasi mendapatkan kekuasaan pada setiap zaman. Ada pengaruh besar Islam yang mempengaruhi sikap pandang masyarakat global dalam ruang interaksinya. Peneliti Karel A. Steenbrink dalam *Dutch Colonialism and Indonesian Muslims, Contact and Conflicts 1596-1950* menyebut ada titik tolak penting dalam hubungan eksplorasi ketika banyak muslim yang bermigrasi ke Eropa dan membentuk kelompok minoritas Islam. Perkembangan ini mempengaruhi gerak teologis yang menempatkan cara pandang baru para pemeluk agama lain seperti Kristen di Eropa.

Wacana Islam pada masa Hindia Belanda juga memberikan pengaruh yang luas dalam politik pemerintahan ketika terjadi permusuhan dan perebutan ruang wilayah. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) seorang organisatoris kekuasaan kolonial di Hindia Belanda misalnya pada Oktober 1613, Ia sudah mengucilkan peran kaum muslim. Menurut Coen, agama merupakan hal yang penting untuk kolonisasi karenanya teramat sulit sekiranya Hindia Belanda jika yang ia pekerjakan disini adalah orang atau sekelompok manusia yang memiliki agama yang berbeda. Isu keagamaan merupakan isu sentral Coen ketimbang isu tentang ras karena bagi Coen cara ini merupakan bagian dari pemantapan hubungan baik secara ekonomi maupun sosial dengan kelompok muslim.

Hubungan antara Hindia Belanda dengan kelompok muslim juga semakin memanas manakala ada kebijakan pemurtadan secara kolektif. Pada tahun 1622, Coen misalnya saja memerintahkan direktur kompeni di Ambon agar menghancurkan desa Way setelah lebih separo penduduk desa menjadi muslim. Termasuk masalah pindah agama dari para pegawai kompeni yang membuat keberadaannya harus diekstradisikan. Kompeni sama sekali tak mentoleransi siapa saja orang Belanda yang telah melanggar garis pemisah antara pribumi dan kompeni karena telah memeluk agama Islam.

Pada masa Inggris di Hindia Timur sejak 1811-1816, Sir Thomas Stamford Raffles juga tak menganut kebijakan pro Islam dalam bidang politik. Ia memandang kaum muslim terutama para haji yang datang dari Mekkah sebagai musuh paling besar bagi setiap rezim kolonial.

Dalam rentang 1850 – 1940 ketika ekspansi pemerintah Belanda kembali mencapai puncaknya dimana pendapatan daerah menjadi fokus utama daripada kepentingan komersial maka perubahan sosial ekonomi dan politik itu diikuti dengan perubahan sikap dalam masalah agama. Keberadaan kelompok muslim tak lagi dipandang sebagai musuh besar yang dianggap sesat tapi lebih dipandang sebagai orang terbelakang yang didik dalam sebuah koloni. Keberadaan dari kelompok muslim ini perlu diberikan pencerahan melalui metode pendidikan modern. Beberapa wakil dari pemerintah kolonial Belanda seperti Karel Frederick Holle, Christian Snouck Hurgronje dan Godard Arend Hazeu merupakan utusan pemerintah kolonial sebagai *adviseur voor Inlandsche* (penasihat urusan pribumi). Keberadaan utusan ini berperan besar dalam menentukan kebijakan pemerintah kolonial tentang Islam. Beberapa kebijakan penting yang muncul era ini merupakan cara yang dipakai pemerintah kolonial dalam upaya menetralisasi Islam melalui pendidikan seperti kebijakan dalam memberikan subsidi untuk pendidikan Islam, ide pemisahan agama dan politik seperti yang diajarkan Snouck Hurgronje ataupun politik etis kebudayaan melalui Godard Arend Hazeu yang lebih dekat dengan gerakan Islam fanatik seperti Sarekat Islam merupakan wujud akomodasi dialektika penguasa kolonial dan kaum muslim pribumi.

Adanya upaya depolitisasi dari umat Islam dalam masa kolonial Belanda memberi nilai diskursus penting terutama menempatkan ulama sebagai pelopor pembaharuan. Kepentingan Belanda di Indonesia mendapatkan kendala dari eksistensi para ulama dimana keberadaan ulama disini tak hanya menjadi ancaman perdagangan tapi juga soal ancaman bagi resistensi pengaruh politis pada masyarakat pribumi (Geertz, 1976).¹

Menjelang kemerdekaan Indonesia, hubungan Islam dan politik menunjukkan geliat yang dinamis. C.A.O van Nieuwenhuijze dalam *Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia* menunjukkan kemodernan Islam tak lagi melihat agama semata pada komunitas sosial tapi ideologi dan gagasan bersama secara luas. Upaya meraih kemerdekaan ini menjadi bukti perjuangan Islam. Pada masa Jepang, wacana Islam dalam ranah sosial politik terefleksikan diakuinya organisasi Islam. Seperti 10 September 1943, Jepang mengakui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada 1 Februari 1944, Jepang mengakui Perserikatan Ummat Islam di Majalengka yang dulunya bernama Persyarikatan Ulama dan Persatuan Ummat Islam di Sukabumi.

Meski mengakui organisasi Islam tapi Jepang tak menghendaki ada partai Islam. Pembubaran Partai Islam Indonesia (PII) menjadi bukti sikap Jepang. Meskipun masa ini Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) yang berdiri sejak 1937 masih eksis sebagai gerakan politik. Namun, MIAI mengalami fragmentasi politik kalangan modernis dan

1 Sejak abad ke 19 ada banyak pemberontakan yang dilakukan oleh para santri seperti perang Cirebon (1802-1806), perang Diponegoro (1825- 1830) atau perang Padri di Sumatera Barat pada 1821-1838 dan juga perang Aceh 1873 - 1908 sebagai akibat dari intervensi pemerintah kolonial Belanda.

tradisionalis. Hal ini membuat NU tak mau berpartisipasi dan MIAI berubah menjadi Masyumi versi Jepang pada 1943.

Sejak masuk tahun 1940-an, perkembangan Islam di Indonesia terus menunjukkan perkembangan intensif. Pada periode ini kontestasi aspirasi politik umat secara terang terinstitusi dalam partai politik. NU yang representasi tradisionalis, sejak awal adalah lawan pembaharuan pemikiran Islam di Jawa yang dipelopori oleh Persis dan Muhammadiyah. Fragmentasi politik pada tahun 1940-an ini juga bicara konteks orientasi politik. Nurcholish Madjid misalnya menyebut ketika bulan November 1945 diadakan kongres umat Islam dan disepakati membentuk partai Islam nama Masyumi dipertahankan oleh orang lama dan kolabolator yang terdiri NU dan Muhammadiyah karena ditentang oleh para intelektual berpendidikan Barat. Sayangnya pertentangan PII atau Pelajar Islam Indonesia ini kalah suara maka jadilah Masyumi (*Majelis Syura Muslimin Indonesia*) menjadi partai pertama di Indonesia awal kemerdekaan. Hal menarik menurut Nurcholish Madjid, Masyumi sebagai partai politik warisan Jepang yang dianggap menyenangkan kelompok politik di dalamnya tapi belakangan partai ini justru digugat penghuni aslinya dimana NU keluar dari Masyumi sedangkan Muhammadiyah berhenti sebagai anggota istimewa.

Pada tahun 1940-an selain Masyumi ada pula partai-partai Islam seperti NU, Perti dan juga PSII. Eksistensi NU diawal aktivitasnya, menaruh perhatian pada berbagai aktivitas sosial keagamaan, dan bukan politik. NU didirikan dari hasil kesepakatan bersama di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) menghasilkan pembentukan organisasi bernama Nahdlatul Ulama, yang berarti Kebangkitan Ulama, dengan dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Disetujuinya aklamasi tersebut, menjadikan NU terlahir sebagai organisasi keagamaan, keislaman dan kemasyarakatan (*Jamiyyahdiniya, islamiyyah dan ijma'iyyah*). Untuk prinsip dasar dari organisasi ini, oleh K.H. Hasyim Asy'ari telah dirumuskan kitab *Qanun Asasi* sebagai prinsip dasar yang kemudian dirumuskan lagi pada kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut diejawantahkan kedalam *khittah* NU, yang kemudian lebih dikenal sebagai *Khittah 1926*.

Pada tahun 1952, NU menjadi sebuah partai politik. Kemunculan NU sebagai sebuah partai politik tak terlepas dari sikap menarik diri dari Masyumi akibat masalah tidak ratanya pembagian kursi menteri yang ingin diduduki oleh para tokohnya (Noer, 2000, P.77). Penarikan ini dikukuhkan dalam kongres NU di Palembang pada bulan Oktober 1952. Awal pemicunya dimulai ketika Rais'am Majelis Syuriah NU Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengeluarkan usul tentang pembentukan kabinet baru Kyai Wahab meminta agar kursi menteri Agama dipercayakan kepada NU yang kenyataan berlawanan dengan Masyumi yang menjadi formatur pembentukan dan kemudian menyinggung pada jatah menteri di kabinet yang diterima NU lebih sedikit dari Muhammadiyah.

Selain NU, ada pula Perti dan PSII yang menjadi partai Islam di Indonesia pada tahun 1950-an. Perti merupakan partai politik yang berasal dari organisasi Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah berpusat di Bukit Tinggi Sumatera pada 20 Mei 1930. Perti memiliki jejaring pusat pendidikan seperti Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Kemunculan Perti disebabkan adanya hubungan kurang mesra Majelis Islam Tinggi di Sumatera yang kemudian hari berubah menjadi Masyumi. Sementara PSII atau partai Syarikat Islam Indonesia merupakan partai tertua di Indonesia karena berasal Sarekat Dagang Islam (1911) dan Sarekat Islam (1912). PSII didirikan pada 1947 karena Masyumi yang menjadi satu-satunya partai politik Islam di Indonesia pada tahun 1940-an tak mengakomodasi kepentingan pihak dari partai lama masa kolonial seperti PSII.

Diskursus tentang fragmentasi politik Islam dalam partai Islam pada masa Soekarno tak hanya bicara dalam perebutan jatah kursi kekuasaan di pemerintahan. Tapi juga menyentuh pada perdebatan tentang wacana pemikiran dalam melihat masalah Islam dan juga konteks bernegara. Misalnya saja masalah Darul Islam yang dimulai sejak 1948, gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku pada 1950 dan gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada tahun 1950 dan juga gerakan Daud Beureueh di Aceh 1953 dimana dari serangkaian isu separatis tersebut secara implisit memunculkan tentang isu negara Islam atau negara pancasila. Termasuk pidato Soekarno tentang negara nasional di Amuntai Kalimantan Selatan. Pidato Soekarno di Amuntai kala itu mendapat serangan respon banyak pihak kalangan Islam karena Ia dianggap menentang tentang adanya cita-cita negara Islam dan memilih menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler (Dijk, 1981, p.257).

Masuk pada masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1957- 1965, diskursus tentang Islam di Indonesia bukan saja pada posisi melemah tapi juga memberi tekanan yang sangat tinggi terhadap kalangan politisi muslim yang bersebrangan pandangan dengan Soekarno. Termasuk untuk patuh wacana Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) Soekarno. Ketergantungan Soekarno terhadap negara komunis juga mempersulit posisi partai Islam pada saat itu. Masyumi yang kritis terhadap isu pemerintahan Soekarno menjadi korban atas ketegangan hubungan partai Islam dengan pemerintah. Natsir yang menjadi pemimpin Masyumi banyak memiliki pandangan yang bersebrangan dengan Soekarno. Apalagi ketika para elite Masyumi seperti Natsir yang juga aktif di PRRI/Permesta membuat keberadaan Masyumi menjadi partai yang dilarang. Para politisi Masyumi dianggap bagian dari kelompok pemberontak pemerintah Indonesia. Sejak 17 Agustus 1960 presiden Soekarno meminta pembubaran Masyumi sebagai partai politik dan memberikan batas waktu 30 hari untuk membubarkan diri. Pada tanggal 13 September 1960 Masyumi membubarkan diri meskipun dari pihak Masyumi tetap mengajukan gugatan ke pengadilan atas sikap politik Soekarno. Pengajuan gugatan itu sendiri tak pernah ada jawaban dari pengadilan tinggi karena dianggap bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam konstitusi. Beberapa tokoh Masyumi seperti Jusuf Wibisono, Sukiman dan Abu Hanifah ikut dalam PSII.

Sikap NU, Perti dan PSII yang terlihat diam dan tak banyak berkomentar kritis menjadi gambaran penting bagaimana realitas dan pergerakan politik kelompok Islam masa demokrasi dipimpin Soekarno. Hal yang menarik ketiga partai Islam yang ada yakni NU, Perti dan PSII seakan tak lagi menunjukkan idealisme identitasnya tapi larut dalam kepatuhan kehendak politik Soekarno. Sikap politik luar negeri Soekarno terhadap Malaysia yang memunculkan slogan “ganyang Malaysia” pada 25 September 1963 juga seakan menutup mata atas keberadaan partai Islam di Indonesia saat itu seperti NU, Perti dan PSII. Tak ada upaya dialogis yang dibangun oleh partai Islam di Indonesia saat itu dengan kelompok Islam yang ada di Malaysia. Islam Malaysia justru dianggap oleh para elite ketiga partai Islam ini sebagai alat imperialis yang disokong oleh barat sekalipun sikap itu terlihat sangat politis karena Cina dan PKI sebelumnya sudah secara terang menyatakan diri antiMalaysia karena tak ingin Malaysia menjadi negara yang pro terhadap kebijakan Amerika Serikat dan menjadi rivalitas ekonomi yang tangguh bagi Cina. Ketiga partai tersebut juga seakan tidak mempedulikan banyaknya tahanan para tokoh Islam di masa demokrasi dipimpin Soekarno. Bahkan Imron Rosjidi seorang tokoh NU yang turut ditahan tak lagi diperdulikan oleh rekan separtainya. Keberadaan partai Islam di masa demokrasi dipimpin Soekarno semakin mempertegas kebutuhan kepentingan menyematkan diri didalam kuasa fragmentasi politik yang dijalankan Soekarno.

Hal menarik justru adanya kemunculan Sekretariat Bersama Golkar pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) yang menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 yang lahir karena rongrongan PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar merupakan wadah Golongan Karya murni yang tak berada dibawah politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua pertama adalah Brigjen Djuhartono sebelum digantikan oleh Mayjen Suprpto Sukowati pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Desember Tahun 1965.

Domestikasi Partai Politik Islam dan Ulama di Masa Soeharto

Setelah tumbangny pemerintah demokrasi dipimpin Soekarno akibat gerakan 30 September 1965 sempat muncul kegembiraan luar biasa dari kelompok Islam yang selama ini memang bersebrangan dengan politik Soekarno terlebih terhadap politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Tumbangny Soekarno menyudahi matinya geliat politik Islam pada masa demokrasi dipimpin Soekarno. Terlebih harapan itu muncul karena umat Islam dianggap

sangat berperan membantu militer dalam menumpas pemberontakan komunis pada tahun 1965 dalam doktrin bahwa komunis merupakan musuh Islam karena komunis merupakan atheisme yang menjadikan penumpasan komunis bagian dari ibadah. Kemunculan Orde Baru pun pada saat itu tak ubahnya seperti kemenangan Islam.

Kemunculan Orde Baru di pertengahan tahun 1960an juga memunculkan kerinduan untuk menghidupkan kembali Masyumi ataupun Partai Islam Indonesia. Bahkan Mohammad Hatta tahun 1967 juga berniat memunculkan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Awalnya ekspektasi semacam itu direspon baik oleh kelompok militer pada Agustus 1966 dimana pihak Angkatan Darat merasa Masyumi layak diberi izin untuk dihidupkan kembali tapi sikap ini kemudian diralat pada 21 Desember 1966 karena Masyumi dianggap sama dengan PKI yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 (Boland, 1971, p.52).

Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1960-an akhir terlihat tak mengizinkan kekuatan politik Islam karena bangkitnya militansi Islam sama dengan ancaman atas bangkitnya kekuatan ideologi dan sikap primordial ditengah masyarakat dalam hal ini masalah agama. Kemunculan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 5 Febuari 1968 menjadi pintu awal yang dibangun menyeimbangkan kekuatan partai Islam yang sudah ada seperti NU, Perti dan PSII. Parmusi anggotanya terdiri perorangan yang berasal dari Muhammadiyah, Jamiatul Al Wasliyah, Gasbindo, PUI, Nadhatul Wathan, dan juga Malthlaul Anwar. Kalangan eks Masyumi sendiri tak diperkenankan untuk ikut serta dalam Parmusi bahkan H.M.S Mintaredja menjadi figur yang melarang eks Masyumi di Parmusi. Sebelumnya pihak militer mendukung HJ. Naro dan Imron Kadir menjadi ketua dan Sekjen Parmusi menggantikan Djarnawi Kusumo dan Lukman Harun (Prisma, 1990, p.147).

Pendukung Orde Baru dari militer yang tak memiliki partai politik kemudian lebih memilih Sekber Golkar sebagai kendaraan politik dalam mempertahankan legitimasinya. Ali Moertopo menjadi figur kunci dalam mengatur mekanisme aturan baru dalam kepartaian demi memenangkan pemilu. Ia melakukan konsolidasi dengan Sekber Golkar menjadi naungan kelompok militer. Bahkan Ali Moertopo menyebut memenangkan Golkar merupakan perang yang paling besar (Prisma, 1990).

Dalam tata aturan politik yang baru, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 (Permen 12/1969 mengenai susunan fraksi di semua DPR dan DPRD. Hal ini disebabkan undang-undang pemilu akhir tahun 1969 menetapkan bahwa partai yang belum diwakili oleh DPR tak diizinkan ikut dalam pemilu. Celah ini tentu saja merugikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dibentuk sebagai pendukung pemerintahan Soeharto. Adapun fraksi NU pusat melalui juru bicara Imam Sofwan menentang keras kebijakan ini karena tujuan dari dikeluarkannya Permen 12/1969 itu hanya untuk memaksakan masuknya anggota anggota baru di DPRD

DPRD dari kalangan pegawai negeri dan purnawirawan ABRI, mengubah keseimbangan kekuatan disemua DPRD, dimana fraksi Golkar menjadi mayoritas tunggal. Pada waktu itu, pihak NU memberikan julukan kepada Menteri Amir Mahmud sebagai *menteri Bulldozer* dengan maksud untuk menggambarkan watak Menteri yang tak pernah peduli dengan segala aturan main sesuai dengan hukum berlaku. Saran partai agar Menteri menanggihkan Permen 12/1969 itu hingga pelaksanaan pemilihan umum ditolak Menteri tanpa memberikan penjelasan yang demokratis.

Di tengah kemelut aturan main berpolitik di Indonesia, pada pemilu tahun 1971 Golkar mendapatkan perolehan suara sebanyak 62,8 %, NU mendapatkan 18,67%, Parmusi 7,365%, PNI sebesar 6,94 % dan Perti sebesar 2,39%. Pemilu 1971 semakin mempertajam disharmoni hubungan partai Islam dengan pemerintah. Partai Islam seakan mendambakan pemilihan umum seperti yang pernah dirasakan tahun 1955. Adapun Rais Aam KH. Wahab Chasbullah di depan Muktamar NU Ke-25 memberikan isyarat bahwa tidak ada gunanya NU menjadi partai politik karena dengan menyelenggarakan pemilu seperti tahun 1971. Partai NU atau partai manapun tidak akan mungkin memenangkannya. NU pun diminta tak menarik diri dari DPR/DPRD hasil pemilu 1971, demi menghindari kemudharatan sebagaimana prinsip fiqh *akhafuldl dlararain* dalam pengertian mengambil resiko bahaya yang lebih ringan.

Di sisi yang lain, Muhammadiyah mengeluarkan *khittah* politik tahun 1971 di Ujung Pandang dengan dua garis perjuangan Muhammadiyah. *Pertama*, Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun. *Kedua*, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tak menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan Perserikatan Muhammadiyah.

Sekitar tahun 1970-1971 merupakan perjalanan cukup berat bagi pengalaman empiris partai Islam dalam pergelutan dunia politik. Perubahan struktur politik di Indonesia pada Orde Lama menuju Orde Baru hingga pelaksanaan pemilu adalah fase tersulit yang harus dijalani dalam resistensinya. Dari kalangan NU misalnya, tak sedikit warga, anggota dan simpatisan partai NU yang ditangkap, dipukul hingga dihukum karena maraknya fitnah dan tetap bertahan sebagai pendukung partai NU. Adapun di desa dan kecamatan selalu saja ada kasus yang sengaja direkayasa untuk mendiskriminasikan warga partai. Para khatib dan penceramah yang ada di Majelis Taklim diintimidasi dan diintrograsi supaya takut dan mau meninggalkan partai NU.

Kader-kader NU di semua jajaran hampir merasakan penderitaan dengan tekanan dan intimidasi berat setiap waktunya. Setiap hari selalu saja ada urusan dengan pihak kepolisian, kodim, aparat kecamatan, Baramil, Babinsa dan aparat desa lainnya. Salah satu bentuk

diskriminasinya adalah dengan memarjinalkan warga NU untuk menjabat lowongan posisi penting atau sebagai penghulu, ketua Rukun Tetangga. Pelayanan terhadap warga dihambat termasuk pelayanan administrasi, pelayanan izin ataupun pemamfaatan fasilitas infrastruktur. Misalnya ada sekitar 1286 kasus kader NU di Kalimantan Selatan yang dipanggil, dintrogasi, ditahan dan juga disiksa dengan maksud supaya mereka keluar dari partai NU. Tidak sedikit warga maupun kader NU yang dengan terpaksa menyatakan keluar sebagai anggota maupun simpatisan untuk merapat pada rezim Orde Barunya Soeharto. Banyak kerusakan yang dilakukan pada setiap papan nama berlambang NU dan tidak boleh satupun lambang NU yang dipasang. Banyak pengalaman menyakitkan yang mesti dialami oleh beberapa kader NU karena ditangkap dan diperintahkan memberikan pernyataan tegas keluar dari anggota partai NU. Begitu juga kader Partai NU yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) langsung diberhentikan karena lebih memilih tetap di NU.

Tahun 1971 adalah pemilu kedua setelah Indonesia merdeka dan merupakan pemilu pertama Orde Baru. Sesuai ketentuan perundang undangan, organisasi peserta pemilu 1971 terdiri sembilan Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar). Usulan politik penyederhanaan partai politik tahun 1971. Menurut Soeharto, penyederhanaan partai dimaksudkan memudahkan kampanye dalam pemilu. Pengelompokan dimaksud meliputi kelompok Nasionalis, kelompok spiritual dan Golongan Karya, PNI, Murba, Partai Katolik, IPKI dan Parkindo mengelompokkan kedalam kelompok nasionalis. Sementara partai NU, Parmusi, PSSI dan Partai Islam Perti mengelompokkan diri ke dalam kelompok spiritual. Pengelompokan berlanjut dalam pembagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1971. Pada 5 Januari 1973 bertepatan 30 Zulkaidah 1392 H, berdirilah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan pengukuhan atas kelompok spiritual. Sementara kelompok Nasionalis membentuk Partai Demokrasi Indonesia yang di singkat PDI pada tanggal 10 Januari 1973.

Kebijakan pemerintah Orde Baru sejak tahun 1973 telah mengecilkan peran politik partai Islam secara nasional. Ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dan Undang- undang No. 3 Tahun 1975 Partai Politik dan Golongan Karya membawa perubahan kelompok Islam karena menjadi pendukung Partai Persatuan Pembangunan, sejak didirikannya PPP pada 5 Januari 1973 dengan deklarator partai PPP yaitu Idham Chalid dari NU. Dengan adanya kebijakan penyederhanaan partai politik maka setiap partai politik dituntut untuk memfokuskan pada program untuk menyukseskan pembangunan. Perdebatan mengenai ideologi menjadi hal tabu bagi pemerintah karena dianggap mengganggu stabilitas dan tak produktif.

Dalam perkembangan tahun 1973 sampai menjelang pemilu tahun 1977, dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai Islam sangat bergejolak. Hasil fusi partai Islam dalam tubuh PPP menimbulkan fragmentasi internal. Seperti PSII yang masuk ke dalam PPP

merupakan PSII tandingan yang kritis terhadap Soeharto. Fusi dalam arti peleburan justru memunculkan sikap membanggakan identitas kelompok. Di tengah kemelut sikap dari kelompok Islam itu pemerintah Orde Baru melahirkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada 28 Juni 1975. Kehadiran MUI tak hanya mengurus urusan keagamaan tapi juga dimaksudkan untuk membatasi eksistensi ulama dalam ranah politik praktis. Sejak MUI didirikan ada banyak ulama yang kembali ke pesantren. MUI sendiri mendapat fasilitas dari pemerintah dan menariknya pemerintah juga masuk dalam kepengurusannya.

Tak ingin kehilangan suara umat Islam pada pemilu tahun 1977, Kiai Bisri Sjansuri, Rais Aam, Ketua Umum Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan PPP yang juga Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjelang pemilu tahun 1977 mengatakan

”....wajib hukumnya setiap peserta pemilu 1977 dari kalangan umat Islam pria maupun wanita, terutama warga Persatuan Pembangunan untuk turut menegakkan hukum dan agama Allah dalam kehidupan bangsa kita dengan jalan menusuk tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan pada waktunya nanti, maka barang siapa di antara umat Islam yang menjadi peserta dalam pemilu tetapi tidak menusuk tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan karena takut hilangnya kedudukan atau mata pencaharian maupun sebab sebab lain adalah termasuk orang orang yang meninggalkan hukum Allah.”

Uniknya, tak berapa lama beberapa tokoh ulama PPP juga mengeluarkan pernyataan baru bahwa walaupun ada umat Islam yang memilih Golkar maka Ia juga akan masuk surga karena mencintai negara. Kondisi seperti ini tak hanya memberi kontroversi tapi menjadi diskursus hangat dikalangan intelektual organisasi Islam.

Dalam pemilu tahun 1977, PPP mendapatkan suara 29,3 %. dimana NU menjadi partai yang mendominasi dalam pembagian kursi, (Lihat lampiran tabel 2). Setahun setelah pemilu tahun 1977, tahun 1978 diskursus wacana Islam pun kembali muncul dimana ada konfrontasi paling serius terjadi selama Sidang Umum MPR 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kali ini GBHN mengandung dua item yang sulit diterima Muslim Indonesia. Satu item menyebutkan aliran kepercayaan berdampingan dengan agama-agama resmi dan karena secara implisit memberikan pengakuan kepada aliran kepercayaan sebagai agama tersendiri. Kyai Bisri Syansuri pada saat itu memandangnya sebagai ancaman terhadap Islam sebagai agama dan memprotesnya dengan keras. Ketika dilangsungkan voting pasal itu, para anggota NU yang diikuti kelompok PPP lainnya meninggalkan tempat sidang. Kekhawatiran terhadap relativisme agama yang terkandung dalam indoktrinasi ini, (semua agama diakui sama serta memberikan tempat sejajar dengan Aliran Kepercayaan). Adapun bahasan lain adalah usulan program pemerintah untuk melakukan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila secara massal, yang kelak menjadi keharusan asas tunggal Pancasila.

Wacana besar tahun 1978 dalam GBHN memunculkan program indoktrinasi wajib ideologi Pancasila bagi warga negara sebagaimana ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II /MPR/1978 pada 2 Maret 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Penerapan P4 dilakukan dengan memberikan penatara P4 yang dilakukan semua kehidupan. Program yang digagas oleh Roeslan Abdulghani ini terbukti efektif dalam konstelasi kekuasaan Orde Baru.

Menyikapi diskursus tentang Pancasila, kelompok NU pada Mukhtar XXV tahun 1979 sudah ada desakan NU kembali pada *Khittah* 1926 sebagai organisasi keagamaan dan tak lagi terlibat dalam wacana politik praktis. Tapi isu ini tak berjalan baik karena Idham Chalid selaku ketua PBNU kembali terpilih sebagai ketua Tanfiziyah PBNU dan isu untuk mengeluarkan NU dalam politik praktis tampak gagal. RUU pemilu yang dibahas tahun 1979 itupun memunculkan perpecahan secara tak langsung dalam tubuh PPP karena banyak kelompok yang tak sependapat tapi tak direspon oleh pimpinan PPP seperti Idham Chalid.

Apa yang terjadi dengan NU pada awal tahun 1980-an tak hanya dalam tataran perebutan kekuasaan secara parsial tapi juga persoalan lemahnya posisi tawar dari kelompok Islam dalam politik pemerintahan. Faktanya akar rumput yang berjuang keras dalam memenangkan partai Islam dalam hal ini PPP dalam setiap pemilu tapi faktanya para elite di PBNU cenderung melunak dengan berbagai upaya marginalisasi pengaruh politik Islam yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Sikap sakit hati para warga NU atas sikap elite PPP dalam hal ini J. Naro yang mengurangi jatah kursi dari NU ini tanpa merundingkan dengan NU menjadi dalil mengapa NU harus keluar dari PPP. Bahkan ada banyak kelompok usahawan NU di Jawa Timur seperti yang disampaikan ketua NU Jawa Timur Abdullah Siddiq yang menyebut NU mengalami kerugian sejak terlibat dalam politik praktis (Majalah Tempo, 1982).

Gejolak yang memanas dalam internal NU ini pun memuncak karena sejak tahun 1983 upaya kuat melengserkan Idham Chalid dari kursi PBNU semakin kuat. Langkah itu diambil setelah tokoh diluar kelompok Idham Chalid mengadakan pertemuan khusus di Surabaya (Ida, 1996, p.53). Konflik menjadi tinggi sejak Idham Chalid yang mengeluarkan sarat pengunduran diri sebagai ketua PBNU meralat pernyataan tersebut. Mukhtar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984 yang mengharuskan NU kembali pada *khittah* 1926 sebagai organisasi keagamaan dan melepaskan diri dari politik praktis yang dalam artinya NU keluar dari PPP.

Polemik NU secara internal dan dengan hasil peristiwa Mukhtar NU Ke 27 pada tahun 1984 ternyata memang besar mempengaruhi konstelasi politik Orde Baru berikutnya dimana pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1985 yang mengharuskan penyeragaman asas pancasila kepada partai politik dan organisasi masyarakat yang sebelumnya sudah diajukan

oleh Soeharto pada sidang pleno DPR 16 Agustus 1982 dan ditegaskan kembali tahun 1983 dalam peringatan Maulid Nabi (Departemen Penerangan, 1982, p.17). Langkah ini tak hanya memarjinalisasi keberadaan partai Islam seperti PPP tapi juga mengharuskan partai PPP yang berlambang Ka'bah untuk menjadi lambang bintang. Perubahan lambang tak hanya menyiratkan makin mendominasinya intervensi pemerintah dalam politik praktis tapi juga mempertegas matinya ekspresi perjuangan dari sebuah partai Islam di masa Orde Baru.

Namun, sikap politik pemerintah Orde Baru terhadap Islam cenderung mencair ketika muncul sikap akomodatif muncul akibat perubahan sikap politik umat Islam terhadap kebijakan negara, terutama dalam pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Perubahan sikap ummat Islam pada paruh kedua 1980-an, dari pihak yang menentang menjadi kelompok yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara bersinergi dengan kebijakan Orde Baru

Wajah peminggiran Islam dari pentas politik nasional yang dilakukan rezim Orde Baru atas kekuatan Islam melahirkan sifat antagonistik hubungan Islam dan negara Orde Baru. Hal ini disebabkan sejak awal Orde Baru hingga tahun 1980-an Islam dianggap sebagai momok keberlangsungan kekuasaan Orde Baru.

Munculnya Pengesahan RUU Pendidikan Nasional dengan disahkannya undang-undang No. 2/1998 tentang pendidikan nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik, pengesahan RUU Peradilan Agama, lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan wakaf bagi umat Islam, dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama pembentukan BAZAS. Termasuk terbitnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para pelajar putri Muslim di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk sekolah. Semuanya bentuk kebijakan Orde Baru yang mulai berpihak pada kepentingan Islam. Masalah Jilbab saja misalnya tahun 1980-an sempat memanas hubungan umat Islam dengan pemerintah karena pelarangan penggunaan jilbab di sekolah, berdasarkan SK No, 052/C/ Kep/D/1982 yang menyebutkan larangan siswi Muslim mengenakan jilbab di sekolah selama jam-jam sekolah

Berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada desember 1990 menjadi awal jalan hubungan yang baik dari hubungan Islam dengan pemerintah Orde Baru. Kehadiran ICMI kala itu paling tidak menjadi titik rileks umat Islam, dimana sebelumnya wacana Islam hanya didominasi oleh NU dan Muhammadiyah dan beberapa orang Islam terkemuka. Wacana ICMI menjadi penting karena berusaha untuk berbicara atas nama kelas menengah baru, yakni muslim terdidik atau terpelajar yang kehadiran mereka menguntungkan program pembangunan ekonomi Orde Baru. Dengan demikian, kelahiran ICMI dapat dimaknai soal tumbuhnya kekuatan politik islamisasi masyarakat Indonesia dan budaya.

Secara khusus periode tahun 1990-an memang terjadi perubahan cara pandang Soeharto terhadap Islam dimana sudah banyak Muslim duduk di pemerintahan, memegang jabatan birokrasi, jabatan menteri sudah mulai diisi kalangan Muslim, ini berakibat pandangan Soeharto mulai berubah. Keputusan Soeharto untuk berhaji semakin membuat hubungan Islam dengan Orde Baru sedikit lebih akomodatif. Naik hajinya Soeharto bersama Ibu Tien dan keluarga pada 17 Juni 1991 itu cukup pengaruh mengubah warna kebijakan dan konstelasi politik di tanah air. Kebijakan Soeharto, yang telanjur dianggap anti-Islam, secara perlahan mulai merangkul masyarakat Islam. Sikap akomodatif banyak kelompok Islam terhadap politik Orde Baru pada tahun 1990-an menunjukkan kecenderungan saling membutuhkan antara kelompok Islam dan negara Orde Baru, bahkan terdapat kesamaan untuk mengurangi konflik yang hadir di antara keduanya.

Kesimpulan

Rezim Orde Baru lebih tertarik pembangunan ekonomi. Akibatnya, politik pemerintah Orde Baru secara umum ditandai penekanan pentingnya keamanan dan stabilitas politik. Dengan ditopang ideologi pembangunan dan stabilitas, Orde Baru menampilkan dirinya sebagai rezim politik represif. Intervensi diposisikan sebagai unsur penting pembangunan negara. Kelompok pendukung Orde Baru memonopoli kekuasaan dan mengendalikan kekuatan-kekuatan sosial politik yang berpotensi memecah dan merusak. Pemerintah Orde Baru tampak belajar dari masa Soekarno yang mengalami instabilitas politik. Tak mengherankan jika pemerintah Orde Baru mencoba merekayasa semua aspek kehidupan sosial politik masyarakatnya.

Dengan politik akomodatif, peran Partai Islam di masa Orde Baru cenderung mengikuti perpolitikan Nasional dan memilih politik akomodasi atau mengandalkan kepentingan umat Islam dan memilih jalan tengah yang tak merugikan masyarakat banyak. Apalagi sikap curiga dan kekhawatiran terhadap kekuatan politis membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha melakukan domestikasi (penyempitan) gerak politik Islam, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Akibatnya, pemimpin politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara seperti pada 1945 dan dekade 1950-an.

Kecendrungan Islam sebagai simbol politik di kalangan kaum muslim dalam partai Islam di awal kekuasaan Orde Baru telah melahirkan kecurigaan pihak penguasa yang menyebabkan terjadinya sikap peminggiran semua diskursus Islam dari arena politik nasional. Kebijakan politik kontrol terhadap kekuatan politik Islam mewarnai arah politik Orde baru. Kecenderungan politik keamanan dilakukan Orde Baru sebagai sikap hati-hati penguasa terhadap kekuatan politik kelompok Islam.

